

INDEKS PENULIS

Jilid 45 No.1, Januari 2016

Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi 1 - 10
Kristwan Genova Damanik

Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara 11 - 17
I Komang Suka'arsana, Maria Silvy E. Wangga

Diskresi Yudisial: Antara Keadilan dan Pencitraan 18 - 24
Agus Nurudin

Urgensi Revisi Undang-Undang Terorisme 25 - 32
Ali Masyhar

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 33 - 40
Amalia Diamantina

Mengartikulasikan “*Trial By The Press*” dalam Kemasan Pemberitaan Media yang Berorientasi Kemaslahatan 41 - 48
Amir Machmud Ns

Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017 49 - 57
Sri Wahyu Ananingsih

Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang Perizinan 58 - 66
Dyah Adriantini Sintha Dewi

Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia 67 - 74
M.Doing

Pengaturan Folklor Secara *Sui Generis* dalam Undang-Undang Tersendiri 75 - 84
Yusna Melianti, Julia Ivanna, Reh Bungana Beru Perangin-Angin

Jilid 46 No.2, April 2016

Desain Daerah Khusus/ Istimewa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi 85 - 92
Baharudin

Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dan Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia 93 - 100
Christina Maya Indah Susilowati

Optimalisasi Konsep *Reward* terhadap *Whistle Blower* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 101 - 106
Edi As'adi

INDEKS PENULIS

- Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** 107 - 114
Hengki Andora
- Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Hukum Islam sebagai Media menuju Keadilan** 115 - 122
Efa Rodiah Nur
- Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional** 123 - 130
Nyoman Serikat Putra Jaya
- Notaris dalam Sengketa Perbankan Syariah** 131 - 139
Ro'fah Setyowati
- Kebijakan Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak** 140 - 149
Sri Kusriyah
- Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis** 150 - 156
Setyo Trisnadi
- Prinsip *Checks And Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia** 157 - 163
Sunarto
- Jilid 46 No.3, Juli 2016**
- Pendekatan Filsafat Ilmu Dalam Uji Konstitusionalitas Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati (Telaah Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21/PUU-VI/2008)** 164 - 172
Muhammad Kadafi
- Problematika Pembebanan Hak Tanggungan dengan Objek Tanah yang Belum Bersertipikat** 173 - 180
Siti Malikhatun Badriyah
- Urgensi Diterapkannya Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Pengelolaan Perusahaan Daerah** 181 - 190
Maria Fransiska Owa Da Santo
- Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur** 191 - 197
Sigit Agung Susilo
- Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi** 198 - 206
Danggur Konradus
- Pelaksanaan Hubungan Kerja dengan Sistem “*Outsourcing*” Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 Di Nusa Tenggara Barat** 207 - 215
L.Husni, Any Suryani Hamzah

INDEKS PENULIS

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal dalam Konteks Espansi PT. Telkom Indonesia, Tbk di Timor Leste Ditinjau dari Perspektif Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Elisabeth Anna Kanahebi	216 - 223
Diskriminasi dalam Hukum Perkawinan (Penelitian Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias) Niken Savitri, Maria Zalukhu	224 - 232
Peran Bank Indonesia dalam Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Daerah Tri Budiyo	233 - 242
Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia Islamiyati	243 - 251
Jilid 45 No.4, Oktober 2016	
Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif Sunarto	252 - 258
Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 Sukirno	259 - 267
Rekonstruksi Peran Polri dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Poniman	268 - 275
Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014 Mukhlis R.	276 - 284
Era Digital (Pergeseran Paradigma dari Hukum Modern ke Post Modernisme) Iskandar Wibawa	285 - 291
Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Imelda F.K. Bureni	292 - 298
Pertanggungjawaban Direksi BUMN terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Henny Juliani	299 - 306
Hak Atas Ruang Hidup Suku Orang Rimba (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Hukum Adat) Muhamad Erwin	307 - 317
Islam Sebagai Sumber Hukum Internasional Eka An Aqimuddin	318 - 325

INDEKS PENULIS

Reposisi Politik Hukum Perjanjian Internasional dalam Rangka Mewujudkan Tertib Hukum di Indonesia	326 - 333
Dhiana Puspitawati, Adi Kusumaningrum	

INDEKS SUBJEK

A

Aksiologi, 307, 314, 315

APBD, 234, 235, 236

Asas Legalitas, 126, 253, 254, 255, 257, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258

B

Bank Indonesia, 234, 235, 236

C

Checks and Balances, 157, 159

D

Daerah Khusus/Istimewa, 85, 86

Dikriminasi, 225, 226, 229, 230, 233,

E

Epistemologi, 307, 316

F

Filsafat Ilmu, 164, 165, 171,

Folklor, 75, 76, 77, 81, 82,

G

Globalisasi, 67, 69, 73,

Good Corporate, Governance, 182, 183, 189

H

Hak Atas Ruang Hidup, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 316

Hak Cipta, 75, 76, 77, 82,

Hak Tanggungan, 174, 175, 180

Hubungan kerja, 208, 212, 215

Hukum Adat, 225, 227, 229, 307, 314, 315

Hukum Ekonomi, 67, 69, 73

Hukum Internasional, 318, 319, 321, 324

Hukum Islam, 244, 247, 250, 251

Hukum Perkawinan, 225, 227, 229, 230, 233,

Hukum Pidana Adat, 123, 126

Hutan Adat, 259, 260, 261, 263

Hutan Hak, 259, 263, 264, 266, 267

I

Ijin Pemeriksaan, 11, 14, 17

J

Jurnalisme, 41, 47, 48

K

Keadilan Substantif, 252, 257

Keadilan, 4, 18, 19, 21, 23

Kemaslahatan, 41, 45, 47, 48

Kepastian Hukum, 18, 19, 21, 23

INDEKS SUBJEK

Kepentingan Umum, 107, 109
Kerugian Keuangan Negara, 299, 302, 303, 304
Kerugian Negara, 1, 2, 5, 6, 8, 9.
Ketenagakerjaan, 217, 210, 223
Konstitusi, 85, 86, 90
Korupsi, 1, 2, 4, 7, 9, 103, 101, 292, 293, 294, 297

L

Legal-Meta-Narative, 285, 286, 290
Legal-Micro- Narrative, 285, 287
Lingkungan Hidup, 268, 270
Luar Pengadilan, 268, 270

M

Mahkamah Konstitusi, 259, 260, 269, 327
Masyarakat adat, 33, 34, 35, 37, 40,
Media, 41, 43, 45, 47, 48.

N

Nikah Beda Agama, 244, 247, 250, 251,
Notaris, 131, 134

O

Objek Hak, 174, 175, 180
Ontologi, 307, 309
Outsourcing, 208, 212, 215

P

Pancasila, 93, 94, 107, 199, 201, 204, 206,
Pejabat Negara, 11, 14, 17,
Pelayanan Publik, 58, 59, 65
Pelecehan Seksual, 276, 278, 279
Pembagian Kekuasaan, 157, 158,
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, 123, 124
Pemerintah Daerah, 234, 235, 236
Pemidanaan, 292, 293, 294, 297
Penegakan Hukum, 18, 19, 23, 252, 254, 279
Pengadaan Tanah, 107,
Pengelolaan Zakat, 140, 142, 143
Penyelesaian Perkara Pidana 115
Penyelesaian Perkara Pidana, 115, 120
Penyelesaian Sengketa Medis, 150, 151
Perampasan Aset, 292, 293, 294, 297
Peran POLRI, 268, 269
Perbankan Syariah, 131, 134
Perizinan, 58, 62, 65, 73
Perjanjian Internasional, 326, 327, 328, 329
Perlindungan Anak, 277, 179, 183, 284
Perlindungan Hukum, 150, 151, 153, 155, 276
Persamaan Dimuka Hukum, 11, 12, 14, 17

VI

INDEKS SUBJEK

Perspektif Hukum Islam, 115, 119, 121
Pertanggungjawaban, 299, 300, 303
Perusahaan Daerah, 182, 183, 189
Pidana Mati, 164, 166, 171,
Pilkada serentak, 49, 51, 52, 55, 56,
Pluralisme agama, 95
Politik Hukum, 199, 203, 206, 326, 327, 328, 329, 330, 332
Politik Uang, 49, 51, 52, 56,
Post Modernisme, 285, 290
Profesi Medis, 150, 152
Putusan Mahkamah Konstitusi, 208, 212, 215

R

Radikalisme, 95, 96, 97, 98, 99
Reposisi, 326,, 331, 332

S

Sanksi pidana, 192, 193, 194, 194, 195, 196,
Sengketa, 268, 269
Sui Generis, 75, 76, 77, 82,
Sumber Hukum, 318, 320, 323, 324

T

Tanah, 174, 175, 180
Tenag kerja lokal, 217, 210, 223,
Terorisme, 25, 26, 28, 29, 31

U

Uang Penganti, 1, 2, 7, 9

UCAPAN TERIMAKASIH

Seluruh pengelola Jurnal Masalah Masalah Hukum menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kontribusi Mitra Bebestari yang telah melakukan penelaahan terhadap jurnal Masalah Masalah Hukum Jilid 45 Tahun 2016, kepada :

1. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D., Universitas Indonesia, Indonesia
2. Prof.Dr. Sulistyowati Irianto, M.A., Universitas Indonesia, Indonesia
3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D., Universitas Indonesia, Indonesia
4. Prof.Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia
5. Prof.Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
6. Prof.Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi, S.H., M.M., Universitas Sebelas Maret, Indonesia
7. Prof.Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum., Universitas Negeri Jenderal Soedirman, Indonesia
8. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Universitas Bina Nusantara Jakarta, Indonesia
9. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LL.M., Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
10. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., Universitas Sebelas Maret, Indonesia
11. Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia
12. Prof.Dr. Marwati Riza, S.H., M.H., Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia
13. Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia
14. Prof.Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., Universitas Hasanuddin
15. Dr. Oky Deviani Burhamsah, S.H., M.H., Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia
16. Prof.Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
17. Prof.Dr. Muh. Fauzan, S.H., M.Hum., Universitas Negeri Jenderal Soedirman, Indonesia
18. Prof.Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H., Universitas Sebelas Maret, Indonesia
19. Dr. Herlambang Perdana W., S.H., M.A., Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
20. Prof.Dr. Anwar Borahim, S.H., M.H.